

DISERTASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN TINGGI
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIU**



OLEH :

**FIRDAUS
NIM : 1171600016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN TINGGI SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**



FIRDAUS
NIM : 1171600016

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2021

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN TINGGI SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Program Studi Doktor Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh:

**FIRDAUS
NIM : 1171600016**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA**

2021

DISERTASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Promotor :

Pof. Dr. V. Rudy Handoko, MS

NPP. 20110860062

Co Promotor :

Dr. Djoko Widodo, MS

NPP. 20110930306

Disusun Oleh :

FIRDAUS

NIM. 1171500499

Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengesahkan,
Kaprodi

Dr. Dra. Bachmawati Novaria, MM.

NPH. 20120930298

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S

NIP. 20110860062

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021



TELAH DI TETAPKAN PANITIA PENGUJI DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
ADMINISTRASI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA PADA TANGGAL, , 2021

Panitia Penguji:

Mulyanto
Nugroho

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA

2. Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM

3. Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS

4. Dr. Joko Widodo, MS

5. Prof. Dr. Arif Darmawan, SU

6. Dr. H. Zakariya, MS., MM

7. Prof. Dr. Warsono, MS

8. Prof. Dr. Bagong Suyanto, M.Si

9. Dr. RR. Amanda Pascarini, M.Si., Psikolog

10. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasisari, Dipl., DHE., MPA

Aji
Arif
Joko
Warsono
Bagong
RR. Amanda
Ida Aju

Program Studi Doktor Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengetahui,
Dekan

Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM.
NPP. 20120930298

Mengesahkan,
Kaprodi

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S.
NIP. 20110860062

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firdaus
NIM : 1171600016
Program Studi : Doktor Ilmu Administrasi

Menyatakan bahwa disertasi yang saya buat dengan judul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 09 Agustus 2021

Hormat Saya





UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TLP. 031 593 1800 (EX 311)
EMAIL: PERPUS@UNTAG-SBY.AC.ID.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Doktor Ilmu Administrasi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

“Implementasi Kebijakan Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 09 Agustus 2021

Yang Menyatakan


FIRDAUS
NIM : 1171600016

ABSTRAK

Menempatkan pegawai sebagai pejabat pada posisi Pejabat Tinggi Pratama seyogyanya memiliki kemampuan, kecakapan dan keahlian sebagaimana tujuan kebijakan Seleksi Terbuka untuk menghasilkan pejabat kompeten dan akuntabel. Seleksi Terbuka di atur dalam PERMENPAN RB No.13 Tahun 2014 Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk a. Memahami dan menganalisis implementasi kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama; b. Memahami, menganalisis dan menemukan model implementasi Kebijakan seperti apa yang diterapkan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama; c. Memahami dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung di dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian dilakukan berlandaskan paradigma post-positivism dan pendekatan quasi-kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) informan kunci yang mengerti dan banyak mengetahui permasalahan penelitian. Metode yang digunakan yaitu melalui wawancara dan penelusuran dokumen, dimana data dianalisis menggunakan model 14 langkah quasi-kualitatif . Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan variable; komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, disposisi dan merit sistem, dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi dan anggaran serta kondisi politik suatu daerah. Selanjutnya, pentingnya kesungguhan penerapan merit sistem untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan ASN pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kebijakan Seleksi Terbuka berhubungan dengan manusia, anggaran, waktu yang lama, mekanisme pelaksanaan yang tak tersedia oleh KASN, tidak adanya mekanisme penjaminan mutu dan indikator penilaian yang kredibel dan tidak adanya Juklak Penilaian dari KASN. Sementara faktor pendukung adalah tersedianya aturan pendukung, dukungan dari gubernur secara moril maupun kebijakan. Tingginya partisipasi peserta dan secara umum menerima hasil seleksi terbuka. Dukungan lain yaitu sikap terbuka tim panitia seleksi, infrastruktur dan teknologi yang memadai yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Seleksi Terbuka, Jabatan Pimpinan Tinggi

ABSTRACT

Placing employees as officials in the position of Primary High Officials should have the ability, skills and expertise to agree on the objectives of the Open Selection policy to obtain competent and accountable officials. Open Selection is set in PERMENPAN RB No.13 of 2014 the Procedure for Filling Open High Leadership Positions in the Government Environment. This research was conducted aimed at: a. Understand and implement the Primary Open Position (JPT) Open Selection policy; b. Understand, analyze and find what model of policy implementation is applied in the implementation of the Primary Open Position Selection (JPT) Primary; c. Understand and analyze the inhibiting and supporting factors in the implementation of Primary Leadership Open Selection (JPT) Primary in the Riau Islands Province Government Environment. The study was conducted based on the post-positivism paradigm and asked for quasi-qualitative. In this study there were 4 (four) key informants who understood and many understood the research. The method used is through interviews and document searches, where data is analyzed using quasi-qualitative 14-step model. The results of the study were conducted based on variables; communication, resources, bureaucratic structure, disposition and merit system, influenced by the ability of bureaucracy and budget and political conditions of an area. Next, the importance of implementing a quality system to improve the quality of regional government bureaucratic and ASN. The inhibiting factors of the Open Selection Policy relating to humans, the budget, the long time, the implementation that is not available by KASN, has nothing to do with quality assurance and indicators that support credibility and there are no Juklak Evaluation Guidelines. While supporting factors are the availability of supporting rules, support from the governor with morale is also a policy. Increase participant participation and generally accept the results of open selection. Another support is the open selection of the selection committee, adequate infrastructure and technology provided by Riau Islands Province.

Keywords: *Policy Implementation, Open Selection, High Leadership Position*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya ucapan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, serta keberkahan baik waktu, tenaga, maupun pikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU”. Bertujuan dalam penyusunananya adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam menempuh Program Studi Strata 3 (S3) Doktor Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas17 Agustus 1945 Surabaya.

Disertasi ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dan berkontribusi dalam pembuatan disertasi ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus Promotor.
3. Bapak Dr. Djoko Widodo, MS selaku Ko-Promotor. Terimakasih atas bimbingan, ilmu, motivasi dan waktu yg diberikan kepada penulis selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Arif Darmawan, SU, Bapak Dr. H. Zakariya, MS., MM, Bapak Prof. Dr. Warsono, MS, Bapak Prof. Dr. Bagong Suyanto, MS, serta Ibu Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM selaku Dosen Penguji. Terimakasih atas saran dan masukannya.
5. Kedua orang tua ku Bapak Lahasim (Almarhum) dan Ibu Hj. Hanifah (Almarhumah) yang mengasuh dan mendidik dari kecil, serta kakak dan abang yang ikut mendoakan hingga saya bisa menyelesaikan S3.

6. Istriku tersayang Hj.Sunarsih yang selalu mendoakan, bersabar, serta memberikan dukungan moril dalam perjuangan ini. Anak-anakku Riyo Bella Nurgraha S.Tr.Kom, Rizqi Apriani Putri S.IP., M.H.I dan Ria Resti Rahmadhini yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk ayah.

Surabaya, 28 Mei 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Firza".

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERYATAAN ORIENTASI KARYA ILMIAH	v
HALAMAN PUBLIKASI PERPUS	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Teoritis	6
1.4.2 Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	20
2.2.1 Teori Kebijakan	20
2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik	22
2.2.3 Model-model Implemenasi Kebijakan.....	30
2.2.3.1 Model Smith	31
2.2.3.2 Model Hogwood dan Gunn	31
2.2.3.3 Model Hoogerwerf	32
2.2.3.4 Model Warwick.....	32
2.2.3.5 Model Gordon Chase	33
2.2.3.6 Model George Edward III	34
2.2.3.7 Model Grindle	40
2.2.3.8 Model Van Meter dan Van Horn	45
2.2.4 Manajemen Sumber Daya Manusia ASN	52
2.2.4.1 Kompetensi Aparatur Sipil Negara	55
2.2.4.2 Deskripsi Jabatan Struktural	58
2.2.4.3 Analisis Penempatan Jabatan Struktural	59
2.3 Merit Sistem	64
2.3.1 Hubungan Manajemen dan Merit Sistem	65
2.3.2 Prinsip Merit Sistem	66

<i>2.4 Critical Review.....</i>	<i>67</i>
BAB III PROSEDUR PENELITIAN	71
3.1 Filosofi dan Paradigma Penelitian.....	71
3.2 Pendekatan Penelitian	72
3.3 Objek dan Informan Penelitian	72
3.4 Metode Penelitian.....	73
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data	74
3.4.1.1 Wawancara.....	74
3.4.1.2 Dokumentasi	75
3.5 Model dan Teknis Analisis Data	75
3.6 Data Penelitian	78
BAB IV GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI OBJEK PENELITIAN.....	83
4.1 Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	83
4.2 Batas Administrasi Daerah.....	85
4.3 Luas Wilayah	86
4.3.1 Topografi	87
4.3.2 Gambaran Umum Demografis.....	87
4.4 Visi dan Misi Daerah.....	90
4.4.1 Visi.....	90
4.4.2 Misi	92
4.5 Arah Kebijakan Pembangunan.....	92
4.5.1 Strategidan Arah Kebijakan Daerah	92
4.5.1.1 Strategi Kebijakan Daerah	92
4.5.1.2 Arah Kebijakan Daerah.....	95
4.5.1.3 Prioritas Pembangunan Daerah	95
4.6 Jumlah PNS Provinsi Kepulauan Riau	98
BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRAMATA	101
5.1 Alasan dan Pertimbangan Pengisian Jabatan Pimpinan	101
5.1.1 Pertimbangan Kompetensi.....	101
5.1.2 Pertimbangan Administrasi	102
5.1.3 Pertimbangan Kultural.....	102
5.1.4 Pertimbangan Politik	103
5.1.5 Pertimbangan Hasil Seleksi	104
5.1.6 Pertimbangan Pimpinan.....	104
5.2 Implementasi Pengisian Jabatan Pimpinan	106
5.2.1 Tahapan Konsultasi Komisi ASN.....	108
5.2.2 Pembentukan Tim Panitia Seleksi	109
5.2.3 Tahapan Seleksi	109
5.2.3.1 Tahap Pengumuman Seleksi	109

5.3.3.2 Tahapan Seleksi Administrasi	110
5.3.3.3 Tahap Seleksi Kompetensi Manajerial (Makala)	110
5.3.3.4 Tahap Seleksi Kompetensi Teknis (Assesmen)	111
5.3.3.5 Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (Wawancara)	111
5.2.4 Hasil Seleksi	112
5.2.5 Pelantikan Pejabat	113
BAB VI MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG (JPT) PRATAMA	115
6.1 Model Eksiting Penempatan Pejabat Tinggi	115
6.2 Model Seleksi Terbuka.....	117
BAB VII MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA.....	131
7.1 Dinamika Politik Demokrasi Provinsi Kepulauan Riu.....	131
7.1.1 Perjuangan Mendirikan Provinsi Kepulauan Riau.....	131
7.1.2 Dinamika Demokrasi Pasca Pemekaran	133
7.2 Faktor Penghambat Kebijakan Seleksi Terbuka	134
7.2.1 Sumberdaya Manusia.....	134
7.2.2 Sumberdaya Anggaran.....	134
7.2.3 Kondisi Politik Lokal.....	135
7.2.4 Waktu Pelaksanaan.....	135
7.2.5 Mekanisme Penjaminan Mutu dan Indikator Penilaian.....	136
7.2.6 Tidak ada Juklat Penilaian dari KASN	136
7.3 Faktor Pendukung Kebijakan Seleksi Terbuka	136
7.3.1 Aturan-aturan Pendukung	136
7.3.2 Dukungan dari Gubernur	137
7.3.3 Partisipasi dari Peserta Seleksi	137
7.3.4 Seluruh Peserta Seleksi Terbuka Menerima Hasil yang Diumumkan	137
7.3.5 Keterbukaan Pansel Dalam Memberikan Pengumuman Seleksi	137
7.3.6 Tersedianya Infrastruktur dan Teknologi	138
BAB VIII TEMUAN PENTING, IMPLIKASI PENELITIAN DAN PROPOSISI	139
8.1 Temuan Penting	139
8.1.1 Seleksi Terbuka Berbeda Dengan Model Berpejatak	139
8.1.2 Sumberdaya Manusia Terekspost	139
8.1.3 Peserta Menerima Keputusan	139
8.1.4 Adanya Resistensi Terhadap Keputusan.....	139
8.1.5 Konsekuensi Terhadap Kompetensi	139
8.1.6 Kesepian Implementasi Merit Sistem.....	139
8.2 Implikasi Penelitian.....	140
8.2.1 Implikasi Teoritis.....	140
8.2.2 Implikasi Implementasi Kebijakan	142

8.3 Orginalitas dan Kebaruan	143
8.4 Proposisi	144
8.4.1 Pentingnya Kemampuan Birokrasi dan Anggaran Serta Kondisi Politik ..	144
8.4.2 Pentingnya Kesungguhan Penerapan Merit Sistem	144
BAB IX PENUTUP	145
9.1 Simpulan	145
9.1.1 Implementasi Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi Kepulauan Riau Berpedoman Pada PERMENPANRP No. 13 Tahun 2014.....	145
9.1.2 Model Implementasi Kebijakan Dilakukan Sesuai Tata Cara	145
9.1.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka	145
9.2 Rekomendasi	146
9.2.1 Pentingnya Niat dan Kesungguhan Dalam Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	146
9.2.2 Pentingnya Memperhatinkan Merit Sistem	146
9.2.3 Perlu Dibuat Aturan Rinci dan Tegas Mengenai Implementasi Seleksi Terbuka.....	147
9.2.4 Perlunya KASN Membuat Protokol Tentang Seleksi Terbuka	147
9.2.5 Perlunya Respon Positif Dari Masyarakat di Daerah	147
9.2.6 Perlunya Mengkaji Merit Sistem Dalam Setiap Seleksi Terbuka.....	147
DAFTAR PUSTAKA	149

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.	Tabel 3.1 Nama dan Kapasitas Informan Penelitian	73
3.	Tabel 4.1 Letak Geografis Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota	84
4.	Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau	85
5.	Tabel 4.3 Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi	86
6.	Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2017	88
7.	Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Struktur Umum Laki-Laki Tahun 2017	89
8.	Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut Struktur Umur Perempuan Tahun 2017	90

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 2.1 Model Implementasi George Edward III.....	34
2.	Gambar 2.2 <i>Implementation as a Political and administrative process</i>	44
3.	Gambar 2.3 <i>A Model Of The Policy Implementation Process Van Meter & Von Horn</i>	46
4.	Gambar 2.4 <i>Defining Competencies in Term Of Behaviors, Outputs and Results</i>	57
5.	Gambar 4.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau	83
6.	Gambar 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Pendidikan.....	99
7.	Gambar 4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Pendidikan.....	100
8.	Gambar 6.1 Pengisian Esselon II Model Baperjakat.....	116
9.	Gambar 6.2 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (jpt) Pratama Model Seleksi Terbuka	121
10.	Gambar 8.1 Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Provinsi Kepulauan Riau	143